

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi adalah suatu tahap dalam proses pelaksanaan kebijakan publik yang dilakukan setelah kebijakan tersebut dirumuskan. Kebijakan publik yang dijalankan akan menghasilkan suatu luaran (*outcome*) yang terutama dirasakan manfaatnya oleh kelompok sasaran atau target yang dituju (Cahyaningrum, 2021: 6). Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan suatu kebijakan melalui serangkaian kegiatan yang bertujuan menghasilkan *output* yang sesuai dengan maksud dan target yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut (Maulidiah & Megawati, 2022: 391).

Sebagai instrumen strategis, implementasi kebijakan publik dimanfaatkan pemerintah untuk mengatasi berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi masyarakat. Secara etimologis, istilah “implementasi” berasal dari bahasa Inggris *to implement* yang berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, serta *to practical effect* yang merujuk pada upaya menghasilkan dampak nyata. Dengan demikian, implementasi berkaitan erat dengan pelaksanaan keputusan-keputusan kebijakan dasar, yang umumnya berbentuk undang-undang, namun juga dapat berupa perintah eksekutif, pedoman pelaksanaan, maupun putusan lembaga peradilan (Maharaksa dkk, 2025: 69).

Pariwisata adalah salah satu sektor yang utama dalam pembangunan untuk meningkatkan pendapatan negara, menciptakan lapangan pekerjaan, serta menyumbangkan devisa bagi negara. Oleh karena itu, pemerintah setempat diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini, dengan mengoptimalkan potensi kekayaan budaya dan tradisi yang ada (Umagapi & Ambarita, 2018: 59).